

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KAWASAN TELUK PALU

Mulyadie

Juan chantika@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The purpose of this study is: To know and analyze the implementation of the policy of tourism development program that has not been effectively involve local communities in the Gulf of Palu. The main theory Willian Dunn policies referenced the theory of Van Meter and Van Horn examines six aspects of standards and policy goals, resources, characteristics of the implementing agency, the attitude tendency (disposition), Activities Implementation & communication between organizations, the economic, social, and political. he place of research in the Gulf Region Palu of Central Sulawesi Province with informants 6 selected people purposive. Collection by way of interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using an interactive model of Miles and Huberman. ut the Tourism Development Program Policy Implementation in the Gulf Region Palu seen from 6 aspects there are only two (2) is not maximized, namely (1) Standards and Policies targets that appear on the lack of coordination or cooperation between government and society (2) Resources are inadequate seen of human resources and infrastructure; While the aspect (3) Communication between organizations; where the government and the community can be created through technology (4) karkarakteristik implementing agency, the policy program of tourism development and the pattern of relations with the implementing agency of the other establishments are sufficient (5) economic conditions, social, and political, it is considered good because the informant had provided food tradisional easily available, the bridge across the river Palu membantang stands to connect or access tranfortasi between Palu Palu West with East, besides also found floating mosques, hotels, shopping centers are increasing travel hasanah Palu bay as a leading tourist attraction in the city of Palu, Central Sulawesi Province , (6) Disposition, basically a tourism development program has been good in the bay of Palu, Palu residents diteluk changes and positive developments in the economy, since tourism began to grow, along with the family began to improve.

Keywords : *Implementation, Policy, Tourism. Palu Bay*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlakukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Serta meningkatkan pengenalan

dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat lokal pada khususnya. Wearting dalam Sunaryo (2013:218) mengatakan bahwa keberhasilan jangka panjang suatu industri pariwisata sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas local. Karena itu untuk memastikan bahwa di suatu daerah

pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas local dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat social dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat.

Mencermati Peraturan Kota Palu No. 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Palu, Teluk Palu masuk dalam kawasan andalan dengan salah satu sektor unggulan adalah pariwisata. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kota Palu khususnya di Teluk Palu mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan wilayah di masa mendatang. Peraturan ini dapat terealisasi dengan baik jika semua *stakeholders* (pemerinta, swasta dan masyarakat) berperan aktif secara seimbang. Dye yang dikutip Young dan Quinn (dalam Edi Suharto (2005:44), kebijakan publik adalah sebuah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan financial untuk melakukannya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, maka peneliti mencermati pendapat para ahli bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan (Van Mater dan Van Horn dalam Widodo:2008:86). Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2008:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Definisi diatas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh dan berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

Pembangunan di kawasan Teluk Palu merupakan harapan dan kebanggaan bagi Kota Palu walaupun secara pembagian wilayah Teluk Palu masuk kedalam 2 (dua) wilayah yakni Kota Palu dan Kabupaten Donggala yang dalam lingkup Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah. Potensi pariwisata pada Teluk Palu terdiri atas wisata bahari berada di bawah laut maupun diatas laut, wisata budaya, ilmiah, dan sport.

Khusus untuk wisata bahari Teluk Palu memiliki lokasi wisata penyelaman yang tersebar di Kabupaten Donggala tepatnya di Tanjung Karang. Tanjung Karang merupakan lokasi terdekat untuk penyelaman yaitu berkisar tiga puluh menit dari Pantai Talise Kota Palu. Perkembangan kunjungan wisata memberikan kontribusai besar dalam perkembangan pariwisata. Pemerintah Kota Palu setiap tahunnya mengadakan Festival Teluk Palu guna untuk promosi wisata kemasyarakat lokal, nasional bahkan dunia internasional. Dalam festival tahunan ini Pemerintah Kota Palu menyajikan berbagai kesenian tradisional masyarakat kota Palu serta mengadakan pertandingan yang bersifat tradisi dan budaya sampai memilih duta pariwisata Kota Palu dengan sebutan *Randa nte Kabilasa*. Pemerintah Kota Palu membuat kebijakan untuk pengembangan kawasan teluk untuk selalu diperindah sehingga kawasan ini benar-benar menjadi kawasan yang memiliki daya tarik buat para wisatawan yang berkunjung. Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam pelaksanaannya sudah dalam proses pengembangan, dari segi penataan pantai, penataan pesisir pantai, sampai melakukan reklamasi pantai untuk bertujuan

memperindah pantai Talise yang menjadi pusat dari Festival Teluk Palu setiap tahunnya. Dengan diadakannya Festival Teluk Palu setiap tahunnya membuat jumlah wisatawan lokal maupun manca Negara tiap tahunnya meningkat. Dengan melihat lonjakan wisatawan sangat membantu perekonomian masyarakat Kota Palu karena setiap diadakannya Festival Teluk Palu masyarakat diberi kesempatan untuk menjual hasil karya kesenian, karya seni rupa serta pameran-pameran lainnya. Pemberdayaan masyarakat menurut para ahli Adimihardjo dalam Bambang Sunaryo (2013:215) mengatakan bahwa bukan hanya menambah dan menumbuhkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah yang bersifat social budaya. Bahkan secara umum dikatakan bahwa posisi masyarakat masih dalam keadaan rentan untuk terpinggirkan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Hal ini didukung dengan model implementasi kebijakan menurut Van Horn & Van Metter (Subarsono, 2005:99) yaitu melihat 6 aspek yaitu standard dan sasaran, sumber daya, komunikasi, Karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemerintah, swasta dan masyarakat belum terjalin interaksi secara seimbang. Artinya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan teluk Palu belum memadai, baik dari segi perencanaan maupun implementasi program kepariwisataan. Padahal masyarakat lokal salah satu strategi yang dapat memberi kemajuan yang signifikan dalam pengembangan objek wisata. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan dan menjawab kebutuhan wisatawan serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, disamping tetap mempertahankan keberlangsungan dalam pembangunan pariwisata.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kebijakan

pembangunan pariwisata di Teluk Palu. Rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Teluk Palu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga berguna bagi pengembangan, pemahaman penalaran dan pengalaman peneliti yang akhirnya berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, referensi serta kontribusi bagi penelitian dalam bidang kebijakan publik dan dapat menjadikan bahan masukan bagi pemerintah kota khususnya Dinas Pariwisata Kota Palu dalam pembangunan Pariwisata kawasan Teluk Palu.

METODE

1. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
2. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan pada Kawasan Teluk Palu.
3. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.
4. Defenisi Operasional
 - a) Standar dan sasaran Kebijakan, yang dimaksud adalah mengimplementasikan program pembangunan yang sesuai dengan undang-undang No.10 tahun 2009 dan Perda no.16 Tahun 2011, dimana pemerintah melaksanakan pembangunan pariwisata menjalin kerjasama pada semua unsur yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - b) Sumberdaya, yang dimaksud adalah sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata di Kawasan Teluk Palu yaitu implementor dan masyarakat
 - c) Karakteristik agen pelaksana, maksudnya adalah pembagian kerja bagi pengelola atau pelaksana kebijakan program pembangunan pariwisata di Kawasan teluk Palu dan pola hubungan

dengan agen pelaksana dari instansi lain.

- d) Komunikasi antar organisasi, maksudnya hubungan kerjasama dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain agar program dapat berjalan dengan baik.
 - e) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, maksudnya dukungan dari masyarakat setempat apakah program pembangunan pariwisata di Kawasan Teluk Palu dengan baik atau tidak.
 - f) Disposisi *implementor*, maksudnya respons dan pemahaman bagi pengelola program pembangunan pariwisata di Kawasan Teluk Palu.
5. Instrumen Penelitian
 Penelitian yang akan dilakukan tersebut menggunakan instrument penelitian berupa: (1) Pedoman Wawancara, (3) Pedoman observasi, (3) Catatan Dokumentasi. Instrumen penelitian yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian kualitatif merujuk pada kapasitas individu peneliti.
6. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
 Teknik dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) melakukan wawancara, (b) melakukan observasi, dan (c) melakukan dokumentasi.
7. Teknik Analisa Data yang dilakukan pada penelitian ini berupa analisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menyajikan hasil penelitian dan membahas permasalahan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan tentu saja melalui proses direduksi, maka terlebih dahulu perlu dideskripsikan secara singkat wilayah penelitian yakni Peraturan Perundang-Undangan No.10 Tahun 2009, kemudian Pemerintah Kota Palu No.16

Tahun 2011. Penduduk Kota Palu berjumlah 309.032 jiwa yang mengharapkan pembangunan pariwisata di Kawasan Teluk Palu akan lebih baik dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Teluk Palu belum berjalan secara maksimal, terbukti hasil penelitian ada 6 aspek yang dijadikan sebagai alat ukur ada 2 (dua) yang dianggap masih membutuhkan pembenahan yaitu (1) Standar dan sasaran kebijakan belum tepat. Dapat dilihat dari Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat belum maksimal. Timbul konflik dalam kegiatan reklamasi pantai di objek wisata teluk Palu. Sarana dan prasarana belum memadai. (2) Sumberdaya pembangunan kepariwisataan di teluk Palu sudah didukung oleh sumberdaya manusia, namun umumnya belum profesional dan belum mendapat dukungan dana memadai dari pemerintah. Selanjutnya ada 4 aspek yang dianggap peneliti sudah berada pada kategori baik yaitu (3) Aspek komunikasi, karena terbangun komunikasi inter dan antar organisasi, tidak terlepas dari kemajuan alat komunikasi dan teknologi serta alat transportasi yang lancar dari berbagai penjuru baik transportasi, darat, laut dan udara. (4) Aspek Karakteristik agen pelaksana, secara fakta dilapangan yang dapat diukur dari kemajuan pembangunan fisik dan non fisik, dimana pembangunan kepariwisataan dapat berjalan seiring oleh agen pelaksana sehingga aplikasi kepariwisataan teluk Palu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan yaitu pelaksana kebijakan program pembangunan pariwisata dan pola hubungan dengan agen pelaksana dari instansi lain sudah memadai. (5) Aspek-aspek social, ekonomi dan politik di kawasan objek wisata teluk Palu tersedia makanan tradisional yang mudah didapat, salah satu jembatan yang membentang melintasi sungai

Palu berdiri megah untuk menghubungkan atau akses transportasi antara Palu Barat dengan Palu Timur, selain ditemukan juga mesjid terapung, hotel, pusat perbelanjaan ikut menambah hasanah wisata teluk Palu sebagai objek wisata unggulan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. (6) Aspek disposisi, menunjukkan bahwa pada dasarnya program pembangunan pariwisata di teluk Palu sudah baik, warga diteluk Palu mengalami perubahan dan perkembangan perekonomian yang positif, sejak pariwisata mulai tumbuh, seiring dengan itu kehidupan keluarga juga mulai *membahk*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Sebaiknya standar dan sasaran kebijakan perlu lebih diimplementasikan yaitu diharapkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, agar tidak terjadi konflik dalam kegiatan reklamasi pantai di objek wisata teluk Palu.
2. Sumberdaya pembangunan kepariwisataan di teluk Palu diharapkan mendapat dukungan sumberdaya manusia yang professional dan mendapat dukungan dana memadai dari pemerintah.
3. Untuk mengatasi masalah dana pengembangan program obyek wisata teluk Palu perlu ditingkatkan kerjasama dengan investor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan tesis ini tidak mungkin terlaksana apabila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehingga menjadi kehormatan untuk saya mengucapkan terimah kasih kepada: Dr. Daswati. M.Si dan Dr. Haslinda Baji. M.Si.

DAFTAR RUJUKAN

- Edi Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Bandung. CV.Afabeta
- Subarsono.AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Palu No. 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Palu.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media Publishing.